

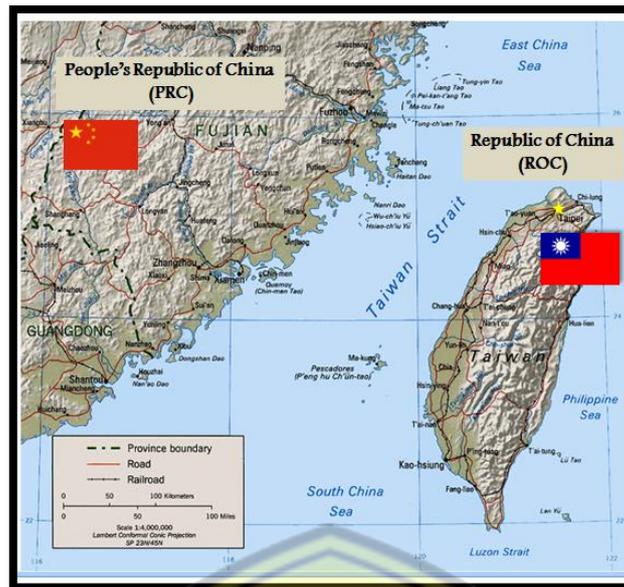
BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

The Republic of China (The ROC) didirikan pada tahun 1912 di daratan China. Perang sipil terjadi yang membuat pemerintah The ROC pindah ke pulau Taiwan (Formosa island) pada tahun 1949 saat kalah dalam perang sipil melawan partai komunis (KEMLU RI 2014, hlm.17). Pemerintah The ROC yang kalah disaat perang sipil tetap menjalankan pemerintahannya di pulau Taiwan. Adanya perang sipil antara The ROC dengan China telah membuat hubungan keduanya menjadi semakin buruk. Meski memiliki konflik dengan China, Taiwan tetap ingin menjadikan wilayahnya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Pada masa pemerintahan Mao Zedong, China menetapkan satu regulasi mutlak dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional, yaitu dengan menerapkan satu mekanisme bahwa setiap negara yang ingin menjalin hubungan diplomatik dengan China wajib menghindari hubungan diplomatik dengan Taiwan dengan alasan bahwa Taiwan telah terdaftar dalam zona yang berada dalam teritori kedaulatan China. Dengan itu China mengeluarkan “*One China Policy*” dan mendeklarasikan kepada forum internasional bahwa sudah selayaknya Taiwan untuk ikut dalam kebijakan China dikarenakan Taiwan telah terikat oleh konsensus 1992 di hongkong (Roberge & Lee 2009, p.6).



Sumber : US-Taiwan *Business Council*

Gambar 1 Peta China dan Taiwan

Namun kebijakan yang dikeluarkan China terhadap Taiwan masih terus dikaji oleh pihak China sehingga isu kemerdekaan menjadi isu selalu menjadi alasan dalam ketegangan yang ada antara China dan Taiwan, dengan itu China telah mengeluarkan undang-undang anti pemisahan pada maret 2005 yang membuat adanya indikasi akan menggunakan kekuatan militer untuk melawan gerakan kemerdekaan Taiwan jika dan ketika mereka mendeklarasikan kemerdekaan Taiwan (Nugroho 2008, hlm.53). Anti pemisahan yang dilakukan China ini mengindikasikan untuk menegaskan bahwa China tidak akan melepaskan Taiwan untuk menjadi negara seutuhnya dan semakin menegaskan kebijakan China untuk Taiwan “*one china policy*” kepada masyarakat internasional.

Dibalik ketegangan yang ada dalam dinamika China-Taiwan terdapat kerjasama yang membuat keduanya perlu meredam ketegangan untuk kepentingan ekonomi. China dan Taiwan merupakan anggota dari WTO (World Trade Organization) yang memperkuat hubungan ekonomi antara China dan Taiwan. Pada tahun 2007 perdagangan bilateral antara China-Taiwan mencapai 102 milyar US Dollar, pada tahun 1991 hanya mencapai angka 8 milyar US Dollar dan Dalam perkembangan, Taiwan mulai mengakui China sebagai patner bisnisnya

yang paling prospektif, terbukti pada tahun 2007 dengan 30% kuota ekspor Taiwan disirkulasikan ke pasar China. Sebaliknya bagi China, Taiwan pun masuk ke dalam daftar *top ten China trading partners*. Setidaknya sejak tahun 1998, pelaku bisnis dari Taiwan telah berinvestasi di pasar China senilai 150 milyar US Dollar. Bahkan tahun 2009 telah menandai peningkatan penerbangan langsung antara China dan Taiwan dari 108 kali per minggu menjadi 270 kali yang artinya mobilisasi masyarakat dari Cina ke Taiwan dan sebaliknya semakin meningkat (Roberge & Lee 2009, p.3).

Tidak hanya itu pada tahun 2010 China-Taiwan meakukan kesepakatan penting dengan dengan melakukan perjanjian dalam rangka kerjasama ekonomi lintas selat (*the Cross-Straits Economic Cooperation Framework Agreement/ ECFA*) dimana dalam kerangka kerjasama ini China dan Taiwan menyebutkan penghapusan dan pengurangan progresif atas tariff sebagian besar barang serta pembukaan sektor layanan untuk urusan penanaman modal kompetisi (KEMLU RI 2014, hlm.42).

China yang kuat secara ekonomi, menjadikan sektor ekonomi sebagai pondasi untuk membangun kekuatan militer yang mulai meningkatkan kapabilitas militernya dengan peningkatkan anggaran pertahanan untuk menciptakan kekuatan militer untuk menyokong industri pertahanan yang mandiri serta melakukan modernisasi terhadap alutsista militernya sehingga China mampu bersaing dengan AS serta negara-negara barat lainnya tercatat pada tahun 2009 anggaran pertahanan China mencapai \$70.2 miliar dan sedangkan tahun 2010 anggaran pertahanan China berada di \$81.3 miliar (Blasko 2011, p.4).

Dengan anggaran yang besar tentu China mampu menciptakan kekuatan militer yang jauh berada diatas Taiwan, kekuatan yang jauh diatas Taiwan bukan berarti Taiwan tanpa pertahanan dan kekuataan militer. Memiliki perekonomian yang baik dan kemajuan teknologi yang sebanding dengan China maupun AS sekalipun membuat China memiliki perekonomian yang mampu memberikan untuk anggaran pertahanan. Pada periode 2010 anggaran pertahanan Taiwan berada di \$9.2 miliar dan pada tahun 2011 anggaran pertahanan Taiwan mencapai \$10.3 miliar (Murray 2008, p.1). Anggaran pertahanan Taiwan memang tak sebanding dan tak sebesar yang di keluarkan China untuk sektor pertahanan

namun Taiwan mampu meningkatkan kekuatan militer dengan anggaran tersebut untuk setidaknya membangun *defence* apabila China menyerang.

Taiwan yang memiliki keunggulan dalam bidang teknologi turut memberikan kontribusi dalam membangun kekuatan militer Taiwan. Taiwan membangun kekuatan militer melalui kemandirian industri pertahanan yang cukup efektif, terbukti dengan adanya 3 organisasi yang berada dibawah komando kementerian pertahanan dan kementerian ekonomi, yaitu *The Chung Institut Sains and Technology (CSIST)*, *the Combine Service Force (CSF)*, dan *Aerospace Industral Development Cooperation (AIDC)* (Pike 2013, p.1). Salah satunya *The Chung Institute Sains and Technology (CSIST)* yang memiliki empat divisi penelitian utama: aeronautika, rudal dan roket, elektronik, dan kimia. CSIST juga memiliki enam pusat untuk pengembangan sistem, sistem pemeliharaan, jaminan kualitas, bahan R&D, pengembangan aeronautika, dan manufaktur rudal. Pada tahun 1983-1988 CSIST terlibat dalam pengembangan peralatan pertahanan senjata kimia dan mendukung angkatan bersenjata dalam memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan senjata kimia, seiring dengan pengembangan rudal menggunakan bahan gandum, dan merancang khusus hulu ledak. Pada tahun 1989-sekarang CSIST telah mengembangkan dan meneliti sesuai dengan arahan menurut kebijakan pertahanan nasional Taiwan (Pike 2011a, p.1).

CSIST telah mampu menghasilkan rudal Kung-feng 6A, Hsiung-feng I dan Hsiung-feng II SAM, sistem kontrol tembakan artileri, sistem sonar angkatan laut, angkatan laut sistem peperangan elektronik, dan pesawat latih Tzu-chiang. CSIST telah menghasilkan atau berencana untuk memproduksi Tien-kung I dan Tien-Kung II SAM, dan Tien-chien AAMs (Pike 2011a, p.3). Industri pertahanan Taiwan yang mandiri dan terus berkembang telah menciptakan alutsista-alutsista yang turut berkontribusi dalam upaya meningkatkan kekuatan militer Taiwan dan untuk meningkatkan pertahanan Taiwan. Taiwan melakukan investasi besar-besaran dalam pertahanan rudal balistik (BMD) sistem. Hal ini juga meningkatkan sistem pertahanan udara untuk mengantisipasi adanya serangan udara dengan rudal jelajah, pesawat berawak dan UAV.

Dongyin merupakan sebuah pulau padat akan granit yang berjarak kurang dari 45 kilometer dari kota Fuzhou China, yang memiliki peran khusus untuk

bermain dalam strategi militer Taiwan. Pada tahun 1988 tentara resimen ROC memulai dengan proyek pembangunan kekuatan militer yang besar untuk meningkatkan pertahanan. Menurut PLA China proyek ini bertujuan untuk membangun serangkaian fasilitas bawah tanah yang bisa menahan serangan-serangan. Proyek tersebut disediakan dengan nama SAM TK-1 dengan basis rudal anti-kapal Hsiung Feng dan SAM TK-2 yakni misil yang berada pada kapal cepat serta membangun terowongan untuk transportasi lintas-pulau serta jaringan komunikasi dan membangun kekuatan bawah tanah. China melaporkan bahwa negara benteng Tungyin termasuk *surface to surface missile* yang berada dibawah *Missile Command* ROC. Menurut Mr Craig Murray yang merupakan mantan US *Department of Defense analyst*, pulau dongyin terus menjadi tempat sebagai salah satu pos-pos strategis militer ROC yang paling mematikan (Easton 2014, hlm.48).

Tidak hanya mengandalkan industri perthanan namun Taiwan mendapatkan pasokan dari Amerika Serikat yang menjual persenjataannya ke Taiwan. Amerika dengan landasan *Taiwan Relation Act* mampu melakukan penjualan persenjataan ke Taiwan dalam rangka membantu Taiwan untuk meningkatkan pertahanan dan Taiwan mulai membangun industri pertahanan sendiri secara bertahap dan efektif dan telah menghabiskan 30% anggaran nasional untuk sektor pertahanan (Khan 2014, p.143).

Taiwan Relation Act adalah landasan Amerika Serikat untuk membangun kerjasama berbagai bidang dengan Taiwan termasuk bidang keamanan dan pertahanan. Amerika Serikat merupakan payung pertahanan bagi Taiwan dan *Tawian Relation Act* merupakan kebijakan Amerika Serikat untuk terciptanya perdagangan persenjataan ke Taiwan. Adanya penjualan persenjataan Amerika-Taiwan membuat adanya peningkatan terhadap kekuatan militer Taiwan. Pada pembelian pertamanya Taiwan ditahun 1980 pemerintah Amerika Serikat telah menyetujui penjualan persenjataan ke Taiwan dengan nilai \$ 800 juta (Khan 2014, p.142).

Hubungan Taiwan-Amerika terus berlanjut dan bahkan terus meningkat dalam penjualan persenjataan. Pada kuartal 2010 dan 2011 Taiwan telah membeli 8 jenis persenjataan lainnya dari Amerika. Dalam transfer paket persenjataan tersebut meliputi *upgrade F-16, CM-32 Amoured Personnel Carrier,*

UH-60M *Blck Hawk Helicopter*, *ATM-84L* dan *RTM-84L Harpoon Block II Telemetry Missile*, *Patriot Advance Capability (PAC-3) Firing Units*, *Training Units* dan *Missile*, *A Pilot Training Program*, *Retrofitting of F-16A/B Aircraft*, *Blanket Order Requisitions for Spare Parts in Support of F-16A/B, F-5E/F, C-130H, and Indigenous Defense Fighter (IDF) Aircraft* (Shang, SW 2012, p.116). Kedelapan paket persenjataan yang dipesan Taiwan ke Amerika Serikat merupakan persenjataan tipe berat seperti misil, helikopter, dan jet tempur. Beberapa paket persenjataan juga merupakan *sparepart* yang dibutuhkan oleh F-16A/B milik Taiwan dan beberapa pelatihan bagi penerbang-penerbang pesawat jet tempur dan juga pelatihan dalam penggunaan misil. Dengan memiliki paket persenjataan tersebut Taiwan telah meningkatkan kemampuan militernya dan ini dilakukan Taiwan untuk meningkatkan pertahanan wilayahnya dari segala ancaman baik ancaman tradisional maupun non-tradisional.

Kerjasama pertahanan Amerika-Taiwan mampu menjadi indikator akan peningkatan kapabilitas militer Taiwan yang terus melakukan modernisasi persenjataan sehingga mampu menciptakan keamanan dan pertahanan bagi Taiwan yang ingin tetap merdeka dari China dan mampu melakukan *Self-Defence* terhadap segala bentuk macam ancaman, Taiwan yang terus berupaya untuk terus meningkatkan kekuatan militernya terus melakukan modernisasi dan melakukan perawatan terhadap sistem persenjataan dan kebangkitan militer China menjadi acuan bagi Taiwan dalam meningkatkan kekuatan militer sehingga dapat tercapainya kepentingan nasional Taiwan untuk bisa melepaskan diri dari China dan menjadikan Taiwan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Hal-hal ini mampu mengubah situasi China menjadi *insecurity* dimana Taiwan terus menjauh dari kebijakan *one China policy* dan meningkatkan kekuatan militernya.

I.2 Rumusan Masalah

Peningkatan kapabilitas militer Taiwan menjadi isu yang sangat sensitif bagi China, karena setiap negara memiliki keamanan nasional yang wajib dipertahankan. Kekuatan militer China digunakan dalam menjalankan keamanan nasionalnya yang disebutkan bahwa China :

-Mempertahankan wilayah, kedaulatan, dan integritas territorial China.

-Dan mencegah kemerdekaan Taiwan (Saunders 2012, p.56).

Peningkatan kapabilitas yang dilakukan Taiwan tersebut bertolak belakang dengan keamanan nasional China dimana China menganggap bahwa Taiwan masih merupakan bagian dari teritorialnya dan China pun masih menganggap Taiwan sebagai propinsinya. Hal ini menjadi sebuah ke *insecurity*an bagi China melihat dimana Taiwan berusaha untuk terus melepaskan diri dari China dan menjauh dari kebijakan *one China policy* yang dianggap tidak cocok dengan Taiwan dan ditambah dukungan Amerika Serikat terhadap Taiwan. kehadiran Amerika Serikat merupakan bentuk dukungan akan kemerdekaan Taiwan dan tidak hanya dukungan politik, dalam hubungan pertahanan keduanya memiliki sebuah kerjasama pertahanan dimana Amerika menjadi payung pertahanan bagi Taiwan termasuk dukungan Amerika terhadap peningkatan kapabilitas militer Taiwan.

Masalah Taiwan sangatlah erat kaitannya dengan keamanan eksternal dan stabilitas internal China. Secara eksternal, bentrokan militer di selat Taiwan bisa berakhir dengan konflik antara China-AS. Secara internal, kesalahan penanganan terhadap masalah Taiwan bisa memicu ketidakstabilan sosial dan perebutan kekuasaan di China (Jiang, Y p.147). Maka dari itu peningkatan militer yang dilakukan Taiwan merupakan sebuah ancaman yang mengganggu keamanan nasional daripada China sehingga China perlu melakukan reaksi terhadap aktifitas yang dilakukan Taiwan pada bidang militer. Dan dari penjelasan diatas penulis dapat merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

Bagaimana respon China terhadap peningkatan kapabilitas militer Taiwan periode 2010-2011?

I.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan Dinamika hubungan antara China dan hubungan Amerika Serikat-Taiwan.
- b. Menganalisis tentang peningkatan kapabilitas militer Taiwan pada periode 2010-2011.

- c. Dan memahami respon China terhadap peningkatan kapabilitas militer Taiwan pada periode 2010 – 2011

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa manfaat yang ingin di capai oleh penulis, yaitu:

a. Manfaat Akademik

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi bagi para mahasiswa Hubungan Internasional pada khususnya dan pemerhati masalah-masalah internasional pada umumnya mengenai kajian wilayah.

b. Manfaat Praktis

Mengetahui respon China terhadap peningkatan kapabilitas militer Taiwan dalam transferpersenjataan Amerika keTaiwan, dan diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti lain terkait isu di Asia Timur khususnya China dan Taiwan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Shang-su Wu “*Taiwan in The Cross Strait Arms Dynamic: Past and Present International Journal of China Studies*” (Shang-su Wu. 2014) Isu kemerdekaan Taiwan membuat Taiwan meningkatkan pertahanan termasuk persenjataan, Taiwan yang memiliki kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat cukup lama dengan menjadikan Amerika Serikat sebagai payung pertahanan bagi Taiwan. Penjualan persenjataan Amerika Serikat ke Taiwan merupakan kebijakan Taiwan untuk meningkatkan kekuatan militer dengan membeli paket persenjataan kepada Amerika dan penjualan persenjataan antara Amerika-Taiwan telah berjalan cukup lama. Dinamika perdagangan persenjataan Amerika-Taiwan mengalami kenaikan dan penurunan jumlah paket persenjataan yang diajukan Taiwan kepada Amerika. Perekonomian Taiwan memang cukup baik namun untuk memenuhi kebutuhan militer Taiwan membutuhkan dana yang cukup besar, pada tahun 2000 dan 2008 menjadi tahun dimana anggaran nasional Taiwan tak mampu mencukupi biaya untuk anggaran pertahanan. Sehingga

kongres Amerika Serikat menolak dan menunda pengiriman persenjataan ke Taiwan sehingga perlu dikurangi.

Jurnal ini juga menjelaskan bahwa posisi Taiwan semakin serius dalam mengancam tentara China di lintas selat Taiwan dengan adanya peningkatan militer Taiwan. Pada jurnal ini juga menjelaskan perkembangan persenjataan antara Tiongkok-Taiwan di masa lalu dan sekarang dimana Taiwan di masa lalu mendapatkan persenjataan dari Amerika Serikat melalui penjualan persenjataan ke Taiwan untuk membantu Taiwan agar mampu *Self-Defence* dari segala ancaman serta China sekalipun. Isu penjualan persenjataan Taiwan menjadi perhatian khusus untuk China, peningkatan kapabilitas militer Taiwan dengan adanya pasokan persenjataan dari Amerika membuat China turut meningkatkan kekuatan militer serta memperbaiki sistem pertahanan. Kekuatan militer China berada diatas Taiwan namun nilai ancaman akan perkembangan dan modernisasi Taiwan tidak bisa dihindari oleh China, pada jurnal ini juga memberikan data mengenai pembangunan militer Taiwan 2008-2011. Dan di kemajuan industri pertahanan Taiwan telah berkembang juga telah menghasilkan beberapa persenjataan seperti missil, jet, serta helicopter. Kebutuhan militer Taiwan kini telah tersinkronisasi oleh kemajuan teknologi di Taiwan sehingga teknologi memberikan peningkatan di sektor militer. Peningkatan militer Taiwan tentu didukung dengan anggaran negara dan dukungan dari non-sipil sehingga menjadi penting bagi kemandirian pertahanan Taiwan dan masyarakat Taiwan dengan memiliki tingkat pertahanan yang tinggi dan modern.

Perbedaan jurnal diatas dengan penelitian yang diambil adalah jurnal diatas berfokus kepada dinamika persenjataan Taiwan dan China yang dimana terjadi *arm race* antara China-Taiwan pada masa lalu sampai saat ini sehingga hal ini menjadi perbedaan terhadap penelitian berfokus kepada respon China terhadap kekuatan militer Taiwan yang meningkat dan mengancam China.

Kemudian dalam buku **Ivan Eland** tentang *The China-Taiwan Military Balance, Implications for the United States* (Ivan Eland. 2003) Memiliki fokus bahwa China yang memiliki kekuatan lebih jauh disbanding Taiwan belum tentu mampu menundukan Taiwan begitu saja karena Taiwan juga memiliki pasukan militer dan persenjataan yang cukup dalam membendung serangan-serangan

China apabila perang terbuka terjadi, adanya persenjataan yang memadai membuat bahwa Taiwan cukup dalam membentengi pulau nya dari serangan China, strategi *self-defense* yang digunakan Taiwan dinilai akan ampuh, presiden Bush pun telah menyetujui penjualan persenjataan kepada Taiwan akan tetapi Taiwan perlu mengeluarkan dana lebih untuk pertahanannya sendiri dan benar-benar membeli persenjataan sesuai dengan yang dibutuhkan. Adanya hubungan ekonomi antara China dan Taiwan membuat China untuk berfikir keras untuk menyerang Taiwan yang dimana China tak ingin merusak hubungan ekonomi dengan Taiwan, namun disisi lain Taiwan tetap menempatkan posisi dimana Taiwan cukup dalam mempertahankan dirinya dan adanya payung pertahanan Amerika Serikat terhadap Taiwan sehingga Amerika perlu meningkatkan penjualan persenjataan kepada Taiwan karena dalam payung pertahanan yang diberikan Amerika Serikat tak bersifat selamanya dimana hal ini membuat Taiwan harus mampu mempertahankan dirinya sendiri. Peningkatan militer merupakan langkah nyata Taiwan dalam menjaga keamanan dan pertahanan dari segala bentuk ancaman. Taiwan memiliki keunggulan di bidang militer terhadap China dan strategi pertahanan Taiwan merupakan cara bagaimana Taiwan mampu mencari celah dalam mengungguli kekuatan militer Taiwan. Kekuatan rudal Taiwan cukup memberikan ancaman kepada China dimana jarak antara Taiwan dan China tidak berjauhan geografi yang dekat membuat keduanya terus meningkatkan kekuatan militer dalam menjaga apabila terjadi konflik terbuka.

Peran Amerika Serikat sangat menentukan, kebijakan strategi Taiwan merupakan kunci dalam meningkatkan kekuatan militer Taiwan dengan Amerika Serikat sebagai poros pertahanan Taiwan dan Amerika Serikat akan melakukan apapun untuk mempertahankan posisi Taiwan sebagai provinsi yang ingin merdeka dari China. Amerika Serikat yang masuk sebagai negara pro Taiwan terus memberikan pengaruh sehingga hal ini dapat memicu konflik antara China dan Amerika Serikat kepemilikan nuklir diantara Amerika Serikat dan China membuat keduanya dihadapkan kepada perang nuklir akan tetapi China lebih mementingkan kepentingannya terhadap Taiwan sehingga China tidak mengedepankan urusannya dengan Amerika Serikat. Taiwan merupakan bagian penting bagi China kemajuan ekonomi dan teknologi membuat China

mempertahankan status Taiwan sebagai provinsi. Amerika Serikat dalam menjalankan hubungan dengan Taiwan harus melakukan penjualan persenjataan ke Taiwan agar Taiwan mampu mencegah serangan China dan Amerika baru akan memberi bantuan apabila strategi pencegahan Taiwan gagal tercapai.

Perbedaan penelitian diatas dengan penulis ambil terdapat pada fokus penelitian dimana jurnal diatas berfokus kepada perimbangan militer China-Taiwan yang berimplikasi kepada Amerika Serikat, sedangkan penelitian yang penulis ambil berfokus kepada respon China terhadap peningkatan kapabilitas militer Taiwan. Adanya perdagangan persenjataan yang dilakukan Amerika-Taiwan membuat system pertahanan Taiwan meningkatkan persenjataan yang di jual ke Taiwan juga membuat adanya modernisasi yang dilakukan pertahanan Taiwan dalam memenuhi kebutuhan militer Taiwan dan China yang beranggapan bahwa Taiwan adalah provinsi yang membangkang mengancam adanya aktivitas perdagangan persenjataan sehingga China merespon terhadap adanya pembelian dan peningkatan militer Taiwan. Penelitian ini juga berfokus kepada pembangunan militer Taiwan dan strategi China dalam merespon peningkatan militer Taiwan baik dengan meningkatkan anggaran pertahanan maupun kematangan prajurit dalam segala situasi dan respon China dalam penjualan Amerika, yang pada buku diatas tidak dijelaskan mengenai respon China terhadap Amerika dan strategi China sebagai aksi respon peningkatan militer Taiwan.

Dan pada jurnal **Reiza Andhika S** tentang *Kepentingan AS bekerjasama dengan Taiwan di bidang perdagangan persenjataan di era George Walker Bush (2001-2009)*" (Andhika. 2015) dalam jurnal ini memiliki fokus antara hubungan AS dan Taiwan dalam sektor ekonomi, politik, dan keamanan dimana pada masa kepresidenan George Walker Bush perdagangan persenjataan antara AS ke Taiwan mencapai 15 miliar dollar AS dan perdagangan persenjataan ini ditandai dengan adanya TRA (*Taiwan Relation Act*) dimana hal ini menjadi tonggak bagi AS dalam melakukan perdagangan persenjataan dengan Taiwan, tidak hanya melakukan perdagangan persenjataan akan tetapi AS juga melindungi taiwan apabila terjadi konflik terbuka dengan China. Konflik Taiwan-China digunakan oleh AS untuk tetap menancapkan pengaruh internasionalnya yang dianggap sangat berpengaruh terhadap upaya-upaya, mencapai, mempertahankan

ataupun melindungi kepentingan-kepentingan ekonomi, sosial, keamanan, dan politik dengan isu-isu demokrasi dan perdagangan bebas dan AS senantiasa memberikan perhatian khusus terhadap upaya-upaya menyebarkan nilai-nilai tersebut.

Adanya hubungan non-diplomatik antara Amerika Serikat dengan Taiwan hingga saat ini, membuktikan bahwa posisi Taiwan sangatlah penting bagi kepentingan Amerika Serikat di Asia Pasifik dan menjadi penting bagi Amerika Serikat turut dalam menjaga stabilitas keamanan di Asia Pasifik. Dengan melihat munculnya kebangkitan China yang semakin kuat sehingga Amerika Serikat harus mampu menjadi payung pertahanan bagi negara pro Amerika termasuk Taiwan. Pada masa pemerintahan Presiden AS George Walker Bush penjualan senjata buatan AS kepada Taiwan menunjukkan angka yang fantastis senilai 15 miliar dollar AS. Kebijakan penjualan senjata yang dilakukan AS terhadap Taiwan, tidak dapat dilepaskan dari konflik yang terjadi antara China dan Taiwan.

Penjualan senjata AS ke Taiwan merupakan bentuk refleksi beberapa kepentingan AS. Dengan Taiwan yang merupakan partner dagang terbesar ke-9 bagi AS, sadar akan cukup besarnya pengaruh Taiwan terhadap perekonomian AS, tentu saja menyebabkan AS senantiasa menjagasiswa keamanan dinegara tersebut dan terus memberikan dukungan. Penjualan senjata AS ke Taiwan pada masa pemerintahan Presiden George Walker Bush tidak dapat dipisahkan dengan latar belakangnya sebelum menjabat sebagai presiden AS. Sebelum menjabat sebagai presiden AS ke 43, George Walker Bush pernah memiliki karir di bidang militer, yaitu sebagai Pilot United States Navy (1942-1945). Dengan latar belakang militer presiden George Walker Bush juga mempengaruhi terhadap *industrial military complex* AS. Sebab, dengan latar belakang karir tersebut, mempengaruhi pandangan AS dalam usaha peningkatan pemasukan negara, dengan memberi perhatian lebih kepada industri persenjataan dan dalam penjualan persenjataan AS.

Perbedaan terhadap jurnal diatas dengan penelitian yang diambil adalah fokus penelitian dimana fokus jurnal diatas membahas kepentingan AS terhadap taiwan pada hubungan keamanan, politik, sosial, dan ekonomi. Pada jurnal diatas juga memiliki periode yang berbeda terkait tema penelitian. Pada tema penelitian

yang diambil berfokus kepada respon China terhadap peningkatan militer Taiwan dimana peningkatan militer Taiwan merupakan salah satu akibat adanya perdagangan persenjataan antara AS ke Taiwan di tahun 2010-2011.

I.6 Kerangka Pemikiran

I.6.1 Balance of Threat

Balance of Threat merupakan kritik terhadap teori perimbangan kekuasaan. Menurut teori ini, dalam sistem internasional yang anarkis dan cenderung pada tidak adanya distribusi kekuatan yang berimbang, negara akan menggalang aliansi dengan atau melawan kekuatan yang paling mengancam (Spring 1985, p.8-9). Aliansi adalah respon atas ketidakseimbangan ancaman (*imbalances of threat*), bukan ketidakseimbangan kekuatan (*imbalance of power*) (Jeffrey & Moravcsik, p.36). Berbeda dengan *Balance of Power* yang melihat balancing sebagai kondisi alamiah dalam sistem internasional yang terdiri dari unit-unit negara ketika terjadi ketidakmerataan distribusi kekuatan terutama militer. Konsep perimbangan ancaman berasumsi bahwa, balancing adalah respon yang dilakukan oleh negara atau beberapa negara terhadap negara lain yang memiliki power (militer, ekonomi, teknologi, dll) besar atau lebih besar dari yang dimiliki negara tersebut. Berbeda dari konsep perimbangan kekuasaan yang melihat pengaruh power itu sendiri terhadap sistem internasional, konsep perimbangan ancaman melihat akibat dari kepemilikan power tersebut terhadap sistem.

Berangkat dari asumsi dasar neorealis bahwa sistem internasional adalah anarkis, bahwa tidak ada pemerintahan yang mengatur negara-negara sehingga setiap negara harus menjamin keamanannya sendiri dalam pergaulan regional maupun global, dan bahwa setiap negara bertindak untuk mencapai kepentingan nasionalnya baik ekonomi maupun keamanan, Walt memandang bahwa kepemilikan power oleh sebuah negara, misalnya rudal balistik atau bahkan senjata nuklir, akan mengancam keamanan dan kepentingan nasional negara-negara lain terutama yang berada di sekitarnya. Walt lebih lanjut menjelaskan sumber-sumber ancaman bagi negara sebagai berikut :

- a. *Aggregate power* : Jenis ancaman ini berasal dari level atau jumlah relative power yang dimiliki oleh suatu negara. Semakin besar kekuatan yang dimiliki seperti populasi, industri, militer, teknologi, dan lain sebagainya, akan semakin besar potensinya bagi negara lain.
- b. *Proximity* : Semakin dekat jarak sebuah negara, semakin besar potensi ancaman yang dimiliki bagi negara lain.
- c. *Offensive power* : Negara yang memiliki kapabilitas militer kuat lebih memprovokasi terjadinya aliansi dalam sistem daripada negara yang kemampuan militernya lemah atau yang militernya hanya untuk pertahanan diri.
- d. Sumber ancaman tersebut merupakan kondisi-kondisi yang menggiring negara-negara dalam sistem internasional untuk membangun aliansi atau melakukan *bandwagoning* (Spring 1985, p.9-13).

Masuk kedalam fokus penelitian dimana konsep *Balance of Threat* mampu menggambarkan situasi Taiwan dalam upaya peningkatan militer dan menerapkan strategi *defence* untuk mengantisipasi China yang memiliki kekuatan jauh diatas Taiwan. Sehingga peningkatan militer Taiwan sangat penting melihat potensi ancaman terhadap China, China telah menjadi ancaman bagi Taiwan dengan tidak melepas Taiwan serta keinginan China menarik kembali Taiwan ke dalam *One China Policy*. Dengan segala upaya dilakukan Taiwan untuk dapat meningkatkan kekuatan militer melalui industri pertahanan dan kemampuan dalam perkembangan teknologi, namun kekuatan China membuat /memprovokasikan Taiwan untuk melakukan aliansi dengan Amerika dimana hal ini terjadi sejak Taiwan kalah dari China daratan (Partai komunis China).

I.6.2 Konsep Security Dilemma

Security Dilemma (Dilema Keamanan) adalah suatu situasi dimana upaya peningkatan pertahanan oleh suatu pihak dalam rangka meningkatkan keamanannya justru mengancam keamanan negara/pihak lain. Pada dasarnya dilema keamanan memiliki asumsi yakni dilema keamanan hadir karena negara-negara yang hidup dalam kondisi anarki dan saling tidak mengetahui niat dan rencana masing-masing berusaha memaksimalkan keamanan mereka dengan berusaha terus meningkatkan kekuatan militer mereka untuk tujuan pertahanan.

Namun, peningkatan pertahanan ini justru dimaknai sebagai ancaman oleh pihak lain (karena pihak lain juga tidak mengetahui motif dan intensi negara tersebut) sehingga menimbulkan respons *balancing* dalam bentuk peningkatan persenjataan oleh pihak lain. Kondisi ini membawa pada perlombaan senjata (*arms race*) (Perwita & Bandoro 2012, hlm.84).

Menurut John Herz, dilema keamanan sangat inheren dalam sistem internasional yang anarki dimana ketiadaan otoritas tertinggi untuk melindungi negara-negara dari ancaman yang muncul membuat negara-negara berinisiatif untuk melindungi diri mereka sendiri dengan memperkuat militernya. Namun, upaya ini justru menimbulkan kecurigaan dan ketakutan bagi negara lain yang pada akhirnya mendorong mereka memperkuat kapasitas militer mereka sehingga menciptakan perlombaan senjata dan perang (John 1950, p.157).

Dan menurut Robert Jervis bahwa dilema keamanan hadir karena alat atau instrument yang digunakan oleh suatu negara untuk meningkatkan keamanannya justru dimaknai sebagai ancaman oleh pihak lain. Karenannya pihak yang merasa terancam akan membalas dengan melakukan peningkatan alat pertahanan yang setara hingga menghasilkan suatu interaksi berulang yang kemudian menciptakan perlombaan senjata (Robert 1978, p.186-187).

Masuk kedalam fokus penelitian, konsep ini berguna untuk menjelaskan sikap China terhadap peningkatan kekuatan militer Taiwan yang memberikan ancaman kepada negara lain seperti halnya China sehingga menimbulkan situasi *security dilemma* dimana sebuah negara dengan maksud meningkatkan pertahanannya akan tetapi menimbulkan ancaman untuk lingkungan strategisnya. Pada situasi ini China menjadi negara yang merasa terancam terhadap peningkatan kekuatan militer yang dibangun Taiwan maka dari itu China turut meningkatkan kekuatan militernya baik secara kesiapan personil militer ataupun modernisasi alat utama sistem persenjataannya.

I.6.3 Konsep Respon sebagai pola aksi reaksi

Respon berasal dari kata *response*, yang berarti balasan atau tanggapan. Respon juga dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku atau sikap yang berwujud baik atau tidak baik sebelum adanya pemahanman yang mendetail, penelitian,

pengaruh atau penolakan, suka atau tidak suka terhadap serta pemanfaatan pada suatu fenomena tertentu. Respon terjadi karena adanya hubungan sebab akibat, atau dapat dikatakan adanya pola aksi reaksi yang membentuk sebuah respon.

Dalam Hubungan Internasional, pola aksi reaksi ini terlihat dalam interaksi yang dilakukan oleh sebuah negara. Negara merupakan salah satu aktor penting dalam hubungan internasional. Dapat dikatakan bahwa negara memiliki peranan penting terhadap interaksi yang terjadi di dalam dunia internasional. Hubungan Internasional yang terjadi antarnegara pada dasarnya tercipta karena adanya ketergantungan (interdependensi) antar aktor dalam masyarakat internasional, sehingga tidak memungkinkan adanya suatu negara yang dapat menutup diri dari dunia luar (Perwita & Yani 2005, hlm.2-4). Dalam interaksi antar negara terdapat hubungan pengaruh dan respon. Pengaruh dapat langsung ditujukan pada sasaran, tetapi dapat juga merupakan limpahan dari suatu tindakan tertentu. Apapun alasannya, negara yang menjadi sasaran pengaruh yang langsung maupun tidak langsung, harus menentukan sikap melalui respon, manifestasi dalam hubungan dengan negara lain untuk mempengaruhi atau memaksa pemerintah negara lainnya agar menerima keinginannya (Perwita & Yani 2005, hlm.41).

Dalam perkembangannya, hubungan internasional hanya melihat tentang interaksi antara negara-negara berdaulat saja, namun pada dekade 1980-an pola interaksi dalam hubungan internasional juga melihat kepada interaksi antara negara-negara yang berdaulat dengan aktor non-negara yang perilakunya mempunyai pengaruh terhadap kehidupan negara-bangsa. (Perwita & Yani 2005, hlm.3). Peran dari aktor non-negara menjadi penting karena aktor non-negara juga dapat bertindak sebagai kekuatan organisasi non-pemerintah yang telah memiliki jaringan mulai dari tingkat lokal sampai tingkat global, dapat mempengaruhi kebijakan dan tata kelola pemerintahan mulai dari tingkat sub-nasional, nasional, regional sampai tingkat global (Irawan 2011, hlm.2). Dengan kata lain, pola interaksi dalam hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara-negara (*state actors*) maupun oleh pelaku-pelaku non-negara (*non-state actors*) (Juanda 1997, hlm.26-28). Pola hubungan atau interaksi

ini dapat berupa kerjasama (*cooperation*), kompetisi (*competition*), dan pertentangan (*conflict*).

Pada fokus penelitian konsep ini berguna untuk memberikan penjelasan mengenai respon China terhadap peningkatan kapabilitas militer Taiwan dengan isu transfer persenjataan Amerika Serikat ke Taiwan, yang membuat China perlu menyikapi aktifitas transfer tersebut.

I.7 Alur Pemikiran



I.8 Metodologi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan model penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang pada umumnya menekankan terhadap kata-kata kunci dan bukan pada kuantifikasi dalam kumpulan serta analisis data. Sifat dari penelitian kualitatif adalah induktif, konstruksionis, serta interpretif meskipun penelitian kualitatif tidak selalu memasukan ketiga unsur tersebut (Bryman 2004, hlm.266).

I.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian deskriptif. Dimana dengan jenis penelitian ini penulis akan menjelaskan mengenai konflik China-Taiwan serta hubungan Amerika dengan taiwan hingga terjadinya transfer persenjataan dari Amerika ke Taiwan dan peningkatan kapabilitas

militer Taiwan yang berujung kepada munculnya Respon China terhadap peningkatan kapabilitas militer Taiwan.

I.8.2 Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Dimana data primer didapat melalui dokumen pemerintah China, Taiwan, atau Amerika yang di keluarkan oleh kementerian pertahanan atau lembaga terkait. Sedangkan data sekunder didapat melalui observasi pustaka dari buku-buku (*text book*), jurnal-jurnal dan artikel-artikel ilmiah yang terkait dengan kasus yang diteliti. Selain itu, data sekunder juga didapat melalui pencarian dari portal-portal berita, baik melalui media cetak ,maupun media elektronik.

I.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan pemaparan diatas, data primer didapat melalui dokumen dokumen negara yang di keluarkan oleh pemerintah China melalui kementerian yang terkait, seperti Kementerian Pertahanan China dan American Institue in Taiwan. Sedangkan data sekunder didapat melalui studi kepustakaan atau *library research* yang dilakukan oleh penulis di beberapa perpustakaan seperti Perpustakaan FISIP UPN “Veteran” Jakarta, Perpustakaan FISIP Hubungan Internasional UI Depok, penulis juga melakukan studi online atau *online research* dengan mengakses situs-situs berita yang terkait dengan kasus yang sedang diteliti oleh penulis.

I.8.4 Teknik Analisa Data

Dalam melakukan penelitian ini, data yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah dan dianalisa oleh penulis dengan menggunakan konsep yang telah dipaparkan diatas. Dimana konsep tersebut dipakai sebagai alat analisa dalam melakukan penelitian mengenai respon China terhadap peningkatan kapabilitas militer Taiwan.

Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka

I.9 Sistematika Pembabakan

BAB I: PENDAHULUAN

pemikiran yang berisi mengenai teori-teori dan konsep-konsep yang dipakai, alur pemikiran, asumsi, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: DINAMIKA HUBUNGAN CHINA–TAIWAN DAN PENINGKATAN KAPABILITAS MILITER TAIWAN 2010-2011

Pada bab ini berisi dinamika dan hubungan China-Taiwan, dimana dalam hubungan China-Taiwan ada hubungan ekonomi dan politik dan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai peningkatan kapabilitas militer Taiwan yang terdiri dari industry pertahanan dan pembelian persenjataan.

BAB III : RESPON CHINA TERHADAP PENINGKATAN KAPABILITAS MILITER TAIWAN 2010-2011

Pada bab ini berisi mengenai penjelasan mengenai peningkatan kapabilitas militer China dan respon China terhadap adanya peningkatan kapabilitas militer Taiwan di periode 2010-2011 dan respon China terhadap AS atas penjualan persenjataan kepada Taiwan dimasa perodesisasi.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini berisikan saran dan kesimpulan peneliti mengenai penelitian yang telah diteliti.